EXECUTIVE SUMMARY

RESPON ‘ULAMA SHI‘AH TERHADAP REVOLUSI KONSTITUSIONAL 1906-1911 DI IRAN: SUATU TINJAUAN SOSIO-HISTORIS

Oleh: AHMAD NUR FUAD

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal abad ke-20, terjadi revolusi konstitusional atau gerakan konstitusional di Iran.[1] Revolusi yang berlangsung sepanjang 1906-1911 melibatkan banyak komponen masyarakat Iran, mulai kaum pedagang, intelektual sekular, sampai ‘ulama. Revolusi ini merupakan produk dari kuatnya tuntutan masyarakat terhadap sistem politik konstitusional, dengan konstitusi tertulis dan pembentukan lembaga legislatif melalui pemilihan, menggantikan sistem tradisional monarki absolut.

Revolusi konstitusional adalah suatu bentuk reformasi sistem politik. Gerakan ini merupakan konsekuensi dari modernisasi yang telah berlangsung sejak 1820-an setelah berakhirnya perang melawan Rusia, ketika ‘Abba>s Mirza> membentuk angkatan bersenjata yang ramping tapi modern dan mengirim sejumlah mahasiswa untuk belajar di Eropa. Kebijakan ini menghasilkan sejumlah reformis sekular yang terdiri dari beberapa pejabat birokrasi, diplomat yang ditempatkan di beberapa negara Eropa dan beberapa alumni sekolah modern *Da>r al-Funu>n* yang dibangun pada pertengahan abad ke-19.[2]

Terlepas dari adanya keragaman pendapat di kalangan kelompok reformis, mereka disatukan oleh gagasan pembentukan hukum tertulis dan modernisasi. Namun, sebagian besar dari mereka menyamakan reformasi itu dengan peniruan secara membuta aspek-aspek dari sistem politik Eropa (modern). Kaum reformis menerjemahkan buku-buku Eropa, menerbitkan surat kabar, dan membentuk asosiasi atau masyarakat rahasia (*anjoman*). Mereka menyebarkan ide-ide politik modern,

---

[1] Mohsen M. Milani, *The Making of Iran’s Islamic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic* (Boulder, San Fransisco and Oxford: Westview Press, 1994), 8.

[2] Ali Gheissari, *Iranian Intellectual in the 20th Century* (Austin: University of Texas Press, 1998).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti konsep kedaulatan rakyat (Rousseau), aturan hukum (undang-undang), perlindungan terhadap kepemilikan dan kehidupan individu, dan ide parlementarisme.[3]

Permasalahan pokok yang diteliti adalah dinamika konstitusionalisme dan respon ‘ulama Shi>‘ah terhadap Revolusi Konstitusional 1906-1911 di Iran. Permasalahan pokok ini mencakup beberapa masalah; yaitu keadaan sosial, politik dan keagamaan yang menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya revolusi konstitusional, dinamika konstitusionalisme yang melibatkan berbagai kelompok dan aktor, dan respon ‘ulama yang beragam terhadap revolusi dalam kaitannya dengan relasi-relasi sosial yang berkembang.

Masalah pertama berkaitan dengan keadaan dan faktor sosial, politik, dan keagamaan yang melatar-belakangi Revolusi Konstitusional. Pada dekade terakhir kekuasaan Na>s}ir al-Di>n Sha>h (1886-1896), pembaruan menyeluruh menjadi sebuah keniscayaan. Pada masa inilah Sha>h yang sangat antusias terhadap reformasi, berbalik menjadi reaksioner, meningkatkan represi. Pada 1896, Na>s}ir al-Di>n Sha>h mati terbunuh di tangan seorang pedagang yang bangkrut. Dia digantikan oleh Muz}affar al-Di>n Sha>h. Pada masa kekuasaan Sha>h inilah tuntutan untuk penyusunan konstitusi terjadi.

Masalah kedua berkaitan dengan dinamika konstitusionalisme yang terjadi, baik dalam Majlis (parlemen) maupun di kalangan kelompok-kelompok dalam masyarakat Iran. Pada 5 Agustus 1906 Muz}affar al-Di>n Sha>h akhirnya menandatangani dekrit yang memerintahkan pembentukan Majlis yang bertugas menyusun konstitusi. Pada 30 Desember 1906, Sha>h menandatangani konstitusi tertulis pertama Persia. Konstitusi Iran 1906 yang mencakup “Supplementary Law” adalah produk dari kompromi antara pembaru sekular dan ‘ulama. Menurut Milani, ‘ulama berpartisipasi dalam gerakan karena pandangan miopik mereka tentang konstitusionalisme dan keinginan mereka untuk diakui sebagai pendukung dari ide-ide progresif.[4]

Masalah ketiga menyangkut respon ‘ulama yang berbeda-beda terhadap konstitusionalisme. Karena itu, perdebatan yang berlangsung baik di dalam Majlis maupun di luar mengenai konstitusionalisme sepanjang periode tersebut tidak saja melibatkan perbedaan pendapat antara kaum pembaru sekular dan kaum ‘ulama, tetapi juga terutama perbedaan respon dan pendapat di kalangan ‘ulama sendiri.

---

[3] Milani, *The Making of Iran’s Islamic Revolution*, 27-28.
[4] Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Respon ‘ulama terhadap konstitusionalisme dapat dibagi ke dalam dua faksi besar: pro-konstitusionalisme dan anti-konstitusionalisme (absolutisme). Masing-masing faksi mengajukan argumentasi baik berdasarkan pertimbangan keagamaan maupun politik. Beberapa ‘ulama terkemuka seperti Bihbaha>ni>, T{abat}aba>’i> dan Na>’ini> mendukung gagasan konstitusionalisme. Sementara yang lain, seperti Shaykh Faz}lulla>h Nu>ri>, terlepas beberapa konsesi untuk ‘ulama, termasuk pernyataan Shi>‘ah sebagai agama resmi negara (ayat 1),[5] menyebut “Supplementary Law’ sebagai “buku kekeliruan” (*book of error*) dan menyebut kaum konstitusionalis sebagai ateis.[6]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keadaan sosial politik dan keagamaan yang melatarbelakangi terjadinya Revolusi Konstitusional di Iran pada awal abad ke-20?
2. Bagaimana dinamika Revolusi Konstitusional yang melibatkan berbagai kelompok politik dan keagamaan di Iran?
3. Bagaimana munculnya respon ‘ulama yang berbeda-beda terhadap Revolusi Konstitusional, dan mengapa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Revolusi Konstitusional di Iran pada awal abad ke-20.
2. Mengungkap dinamika Revolusi Konstitusional yang melibatkan banyak kelompok politik dan agama di Iran.
3. Menjelaskan berbagai respon ‘ulama terhadap Revolusi Konstitusional dan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan respon.

D. Kegunaan Penelitian

Secara akademik, penelitian diarahkan untuk menghasilkan suatu perspektif teoretis tentang relasi atau hubungan antara ‘ulama dan politik dalam komunitas Islam

---

[5] Lihat Abdol Karim Lahidji, “Constitusionalism and Clerical Authority,” dalam Said Amir Arjomand (ed.), *Authority and Political Culture in Shi’ism* (Albany: State University of New York Press, 1988), 141.

[6] Milani, *The Making of Iran’s Islamic Revolution*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shi>‘ah. Secara praktis, hasil penelitian ini akan menambah khazanah kajian tentang relasi ‘ulama sebagai otoritas keagamaan dengan isu-sisu sosial dan politik yang berkembang di sekitarnya.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian sejarah ini menggunakan teori sosial yang menyatakan bahwa pengetahuan atau tindakan terhadap realitas dibentuk dan ditentukan oleh adanya relasi sosial, ekonomi dan kekuasaan. Realitas ini bisa dijelaskan dengan teori ‘historical bloc’ yang diajukan oleh Antonio Gramsci. Menurut Gramsci, seperti dikutip oleh Jonathan Joseph, terjadinya konflik atau kontradiksi dalam *ensemble* superstruktur (pandangan agama dan politik) adalah refleksi dari *ensemble* relasi sosial produksi: “the complex and discordant ensemble of the superstructures is the reflection of the ensemble of the social relations of production.”[7] Lebih lanjut, hegemoni sosial (*social hegemony*) bukanlah sesuatu yang *given*, tetapi terus direproduksi dan dikembangkan. ‘Historical bloc’ merepresentasikan interaksi yang kompleks dari pelbagai kekuatan sosial, sejarah, ide-ide dan relasi-relasi sosial.[8]

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penjelasan historis dengan menggunakan sumber-sumber sekunder. Tahapan penelitian meliputi: pengumpulan sumber sejarah (heuristik), verifikasi sumber dan interpretasi serta penulisan sejarah (historiografi).

Sumber-sumber sejarah diperoleh dari buku-buku dan artikel-artikel jurnal yang ditulis oleh para sarjana modern tentang revolusi konstitusional yang terjadi di Iran pada awal abad ke-20. Karya-karya yang ditulis oleh, antara lain, Hamid Algar, Janet Afery, Vanessa Martin, Nikki Keddie, Said Amir Arjomand, dan Mangol Bayat merupakan sumber-sumber sekunder yang digunakan, karena sumber-sumber primer sulit untuk ditemukan. Tulisan-tulisan para sarjana di atas tersebut merupakan rekonstruksi dan interpretasi terhadap sumber-sumber primer yang ditulis oleh para penulis yang hidup sezaman dengan peristiwa revolusi konstitusional, seperti Muh}ammad Nazim al-Islam Kirmani (*Tarikh-e Bidari-ye Iranian*), yang dianggap

[7] Jonathan Joseph, *Social Theory: Conflict, Cohesion and Consent* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003), 49.

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Mangol Bayat sebagai “standard clerical account” yang menjelaskan secara detail peranan ‘ulama seperti Bihbaha>ni> dan T{abat}aba>’i>.

Dalam melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber itu, peneliti melakukan kategorisasi informasi-informasi historis yang diperlukan dalam penelitian ini. Verifikasi menyangkut kredibilitas dan otentisitas sumber lebih ditekankan kepada signifikansi sumber yang tersedia bagi rekonstruksi sejarah berkaitan dengan dinamika konstitusionalisme dan respon ‘ulama terhadap konstitusi. Penelitian ini juga melakukan perbandingan antara satu informasi dengan informasi lain yang terdapat dalam sumber-sumber yang berbeda.

Interpretasi terhadap fakta-fakta sejarah dilakukan antara lain dengan menggunakan kerangka teoretis “historical bloc,” atau blok historis, untuk menjelaskan konteks sosial historis dan faktor relasi-relasi sosial, ekonomi dan politik yang melingkupi peristiwa-peristiwa sejarah dan orang-orang yang menjadi aktor sejarah selama periode konstitusional. Faktor-faktor relasi sosial tersebut sangat penting untuk menjelaskan adanya perbedaan respon ‘ulama terhadap konstitusionalisme.

Penulisan laporan penelitian ini disusun dengan pendekatan diakronik, yaitu mempertimbangkan kronologi (urutan-urutan peristiwa), dan pendekatan sinkronik, yaitu pembahasan tentang aspek-aspek spesifik dari revolusi konstitutional secara mendalam.

II. KONDISI POLITIK DAN KEAGAMAAN DI IRAN SEBELUM REVOLUSI KONSTITUSIONAL

A. Dinamika Politik-Keagamaan Dinasti Qajar

Dinasti Qajar didirikan oleh keluarga Qajar yang merupakan salah satu suku Turkoman yang mendukung Isma>‘i>l, penguasa dinasti S{afawiyyah pertama, dalam penaklukan wilayah Iran. Mereka memperoleh balasan dalam bentuk tanah perdikan (*fiefdom*). Atas dasar ini mereka menjadi salah satu unsur penting dalam sejarah Iran sampai 1794, ketika Agha Muh{ammad Kha>n mengalahkan dinasti Zand. Dua tahun kemudian dia dinobatkan menjadi Sha>h (raja). Namun, kekuasaannya tidak berlangsung lama (hanya berlangsung satu tahun) sebelum dia dibunuh oleh dua orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembantunya. Ketika itu dia telah mengkonsolidasi kekuasaannya atas seluruh wilayah Iran dan menguasai kembali Georgia.[9]

Agha Muh}ammad Kha>n digantikan oleh Fath{ ‘Ali> Sha>h (w.1834). Masa pemerintahan Fath{ ‘Ali> Sha>h ditandai oleh kekalahan Iran melawan Rusia selama perang antara 1804-1813, ketika Iran kehilangan propinsi-propinsi di Caucasus. Selain dengan Rusia, Iran juga berhubungan erat dengan Inggris dan Perancis. Fath{ ‘Ali> Sha>h sangat menghormati ‘ulama. Ini mungkin sebagian disebabkan kesalehan yang dia miliki dan sebagian karena kebutuhan dinasti Qajar untuk membangun legitimasinya sendiri.

Selama memerintah, Fath{ ‘Ali> Sha>h membuat kebijakan yang membatasi kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan ortodoksi Shi>‘ah. Kebijakan ini mendorong berkembangnya dominasi kaum ‘ulama Shi>‘ah ortodoks yang tergabung dalam madhhab Ushu>li>. Figur penting madhhab Ushu>li> pada masa itu adalah Muh{ammad Ba>qir Bihbaha>ni> (1706-1790). Madhhab ini menggantikan dominasi kaum Akhba>ri> pada masa sebelumnya, dan bahkan menyatakan Akhba>ri> sebagai sesat dan kafir.[10]

Patronase otoritas politik kepada ‘ulama ortodoks bertujuan antara lain untuk membangun pengaruh politik dan keagamaan atas komunitas Shi>‘ah. Kontroversi keagamaan yang muncul pada masa ini didorong oleh gerakan Shaykhiyyah yang dibangun oleh Shaykh Ah}mad Ahsa>’i>. Fath} ‘Ali> Sha>h tidak terlalu terlibat dalam masalah ini, tetapi justru gubernur Qazvin, ‘Ali> Naqi> Mirza-lah yang mampu meredam kontroversi tersebut, terutama ketika pemimpin Shaykhiyyah dituding sebagai kafir oleh Muh}ammad Taqi> Baragha>ni>, seorang ‘alim ortodoks.[11]

‘Ulama sering bekerja sama dengan kaum *baza>ri>* dalam tuntutan mereka menyangkut perdagangan yang hancur karena impor Barat. Sementara itu, sebelum pertengahan abad ke-19 ‘ulama jarang aktif menentang kebijakan pemerintah. Para Sha>h selama periode ini pada umumnya berusaha untuk memperlakukan ‘ulama dengan baik dan menujukkan hormat kepada mereka, sedangkan ‘ulama pada

---

[9] Gavin R. G. Hambly, “Aga Muhammad Khan and the Establishment of the Qajar Dynasty,” *The Cambridge History of Iran 7* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 104-143.

[10] Hamid Algar, *Religion and State in Iran 1785-1906: The Role of the Ulama in the Qajar Period* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969), 34.

[11] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gilirannya membatasi tuntutan politik mereka hanya menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan mereka secara langsung.[12]

Konflik atau ketegangan lebih jauh dengan kekuatan Barat, dalam hal ini Inggris, sedikit dihindari pada 1833 ketika Pangeran ‘Abba>s Mirza> yang baru menghentikan pemberontakan kesukuan di Iran timur bergerak untuk mengambil Herat. Kota yang berada di Afghanistan barat dengan penduduk Shi>‘ah yang berbahasa Persia dalam jumlah besar ini ketika itu berada di bawah kekuasaan orang-orang Afghanistan tetapi dianggap sebagai wilayah Iran oleh orang-orang Iran. Pihak Inggris menentang Iran untuk menguasai Herat dengan membantu orang-orang Afghanistan, tetapi konflik ini dapat dihindari ketika ‘Abba>s Mirza> meninggal dunia. Anaknya dan penerusnya, Muh}ammad Mirza>, dipanggil oleh pemerintah pusat dan perang tersebut berakhir.[13]

Fath} ‘Ali> Sha>h digantikan oleh cucunya, Muh}ammad Sha>h yang berkuasa mulai 1834-1848. Baik Fath} ‘Ali> Sha>h maupun cucunya Muh}ammad Sha>h tidak melakukan usaha untuk memodernisasi atau melakukan sentralisasi kekuasaan. Keduanya memerintah dengan cara yang lama, dengan penyesuaian-penyesuaian yang sangat terbatas. Fath ‘Ali Sha>h dikenal lebih karena jenggotnya yang panjang, dan haremnya yang banyak, dari pada prestasi yang positif.[14]

Selama masa kekuasaan Muh}amamd Sha>h, kekuasaan asing, khususnya Inggris, tumbuh, dan pada periode inilah petisi pertama dari kelompok *baza>ri>* melawan dominasi Barat dikirim kepada Sha>h. Gerakan-gerakan keagamaan dan pemberontakan penting mulai terjadi pada tahun-tahun ini, mungkin dikaitkan dengan dislokasi dalam kehidupan Iran yang diakibatkan oleh campur tangan asing. Salah satunya melibatkan komunitas Shi>‘ah Isma>‘i>li> Iran.[15]

Meskipun penguasa Qajar bekerja sama dengan ‘ulama Shi>‘ah ortodoks untuk melenyapkan gerakan dan tarekat sufi yang cenderung mesianis, khususnya pada periode Fath} ‘Ali> Sha>h, guru-guru sufi tetap populer dan diterima oleh masyarakat. Berkembangnya tarekat sufi menimbulkan unsur proto-mesianisme yang mencerminkan tingginya ekspektasi terhadap bangkitnya Imam Mahdi.

---

[12] Nikki Keddie, *Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran* (New Haven: Yale University Press, 1981), 46-47.

[13] Ibid., 47.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atmosfir inilah yang di kemudian hari memberikan momentum bagi tumbuhnya klaim mesianistik, misalnya, oleh Sayyid ‘Ali> Muh}ammad Shi>razi>, yang melahirkan gerakan Babisme. Gerakan Babisme bermula dari klaim Sayyid ‘Ali> Muh}ammad sebagai *al-Ba>b* (pintu) menuju Imam Mahdi pada 1844. Dia dilahirkan pada 1819 dari keluarga pedagang di kota Shi>ra>z. Dia belajar agama dengan ‘ulama Shi>‘ah yang berpengaruh di tempat atau kota suci Najaf dan Karbala di Iraq yang ketika itu menjadi wilayah Turki Uthma>ni>. Dia menjadi pengikut gerakan atau aliran dalam Shi>‘ah bernama Shaikhiyyah, yang didirikan oleh Shaykh Ah}mad Ah}sa>’i> (1754-1826).[16] Pemikiran Shaykhi> mencakup unsur-unsur yang sangat filosofis dan mistis dibandingkan kebanyakan Shi>‘ah ortodoks. Namun, ciri utama mereka ialah pandangan tentang empat pilar, yang menegaskan bahwa selalu ada orang di dunia ini yang mampu menafsirkan kehendak Imam Mahdi dan mungkin berkomunikasi dengannya. Setelah kembali ke Shi>ra>z, pada 1844 Sayyid ‘Ali> Muh}ammad memproklamasikan diri sebagai *Ba>b* (pintu) menuju Imam Mahdi.

Meskipun gerakan Babisme merupakan gerakan keagamaan, namun signifikansi politiknya tidak bisa diabaikan. Setelah kehancurannya pada 1853, dan perpecahannya menjadi dua kelompok, Azali> dan Baha>’i>, kaum Ba>bi> yang masih ada terus menarik banyak orang. Konversi beberapa orang ke dalam gerakan ini sebagian merupakan hasil dari tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah Qajar dan ‘ulama ortodoks terhadap kaum Ba>bi>. Meskipun jumlahnya kecil, tapi kaum Ba>bi> tetap memainkan peran penting sebagai simbol dan pemimpin tak dikenal dalam pembaruan Iran ketimbang sebagai agama massa. Hal ini bisa disaksikan pada awal abad ke-20, beberapa figur terkemuka yang meratakan jalan bagi Revolusi Konstitusional di awal abad ke-20 adalah figur-figur yang punya afiliasi dengan Babisme. Beberapa orang Ba>bi> Azali> menduduki posisi strategis dalam pemerintahan di Iran pada awal abad ke-20.[17]

B. Kebijakan Konsesi Tembakau dan Boikot Tembakau

Terlepas dari hubungan ‘ulama dan negara yang saling menguntungkan pada periode-periode tertentu, tidak jarang ‘ulama juga terlibat dalam kegiatan perlawanan dan protes terhadap kebijakan penguasa Qajar yang dianggap tidak adil dan merugikan.

[16] Lihat Mangol Bayat, *Mysticism and Dissent* (Syracuse: Syracuse University Press, 1982).
[17] Ibid., 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini tampak misalnya dalam gerakan protes terhadap konsesi tembakau (*Tobacco Concession*) yang diberikan oleh pemerintah Qajar kepada Inggris, meskipun beberapa studi tentang konsesi tembakau dan protes terhadapnya menunjukkan bahwa peran para pedagang ternyata lebih besar daripada ‘ulama.

Pedagang secara independen sesungguhnya memiliki inisiatif untuk melakukan gerakan protes, karena termasuk golongan yang paling dirugikan dengan kebijakan konsesi itu. Gilbar, seperti dikutip oleh Afary, menyatakan bahwa di tingkat permukaan ‘ulama memang memimpin gerakan protes yang berlangsung pada 1891-1892 dan berhasil mencabut konsesi, namun kelas pedagang-lah yang sesungguhnya memainkan peran sentral dalam gerakan tersebut, memberinya karakter dan menentukan tujuan akhirnya. Moaddel, yang juga dikutip Afary, menyatakan bahwa ajakan para pedagang kepada ‘ulama merupakan langkah cerdas menggunakan agama untuk tujuan dan kepentingan sekular dan anti-imperialisme. Dengan mengusung simbol-simbol agama, kaum pedagang berhasil mentransformasikan keadaan menjadi konfrontasi antara kaum Muslim dan kaum kafir, yang pada akhirnya secara efektif dapat memobilisasi rakyat melawan intervensi ekonomi asing.[18] Padahal, persoalan pokoknya pada mulanya semata-mata bersifat ekonomis dan politis.

Dari peristiwa ini tampak bahwa hubungan antara ‘ulama dan penguasa sangat ditentukan oleh faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik atau kekuasaan. Sikap ‘ulama terhadap kebijakan penguasa tidaklah tunggal, karena masing-masing ‘ulama punya pertimbangan dan kepentingan yaang berbeda-beda. Hal ini juga nanti akan tampak pada perbedaan sikap ‘ulama terhadap revolusi konstitusional pada dekade pertama abad ke-20.

C. Timbulnya Tuntutan Reformasi dan Para Pembaru Awal

Selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, tuntutan terhadap keadilan sangat menonjol dalam tulisan-tulisan kaum reformis, ceramah-ceramah dari para pendakwah popular, dan petisi dari para pedagang. Tuntutan-tuntutan semacam itu tampak biasa dan absah, sesuai dengan konsep dan gagasan keadilan yang terkandung dalam teori dan tradisi pemerintahan Persia-Islam. Gagasan mesianis tentang

---

[18] Janet Afary, *The Iranian Constitutional Revolution 1906-1911: Grassroots Democracy, Social Democracy, and the Origins of Feminism* (New York: Columbia University Press, 1996), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebangkitan Mahdi yang akan menegakkan keadilan juga menyebar dalam kesadaran kolektif masyarakat Shi>‘ah di Iran.

Gagasan tentang keadilan itu menemukan resonansi baru dalam tulisan-tulisan kaum reformis abad ke-19. Dengan mendapatkan inspirasi dari revolusi Perancis secara langsung, *freemasonry* dan pemikir bebas, dan bahkan dari pemikir Uthma>ni> Muda (Young Ottoman) serta para penganjur reformasi politik dan moral, para pembaru di Iran berusaha menyamakan gagasan keadilan (‘*adalat*) dengan tujuan-tujuan keadilan sosial dan hak-hak warga negara yang sama yang terkandung dalam istilah Perancis, *egalite*.[19]

Mirza Malkum Kha>n (1833-1908) adalah penulis reformis pertama yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang madhhab-madhhab pemikiran liberal Perancis dan Inggris. Mirza Malkum Kha>n juga menulis tentang konsep-konsep politik yang diadopsi dari pemikiran Eropa. Istilah-istilah kunci seperti *qa>nun* (konstitusi), *eslahat* (reformasi), *majlis shu>ra>* (lembaga konsultasi), *mellat* (bangsa), *melli* (kebangsaan) dan *h}uquq mellat* (hak-hak rakyat), pertama kali diperkenalkan dalam karyanya *Kebaca-ye gaybe ya daftar-e tanzimat* (buku yang diilhami oleh yang gaib atau buku pembaruan), ditulis pada 1858/59, yang merupakan penjelasan (eksposisi) sistematis yang diketahui paling awal dalam bahasa Persia tentang sistem konstitusional.[20]

Selain itu, terdapat intelektual bernama Akhundza>da> (Akhundov; 1812-78) yang merupakan pendahulu aliran sekularis dengan pandangan-pandangan anti-klerikal (anti agama atau anti ‘ulama) yang nyata. Banyak tema penting selama periode konstitusional –pendidikan sekular, rekonstruksi moral, keras terhadap takhayul- dapat dilacak pada tuisan-tulisannya. Akhundzada, yang menghabiskan masa dewasanya di pemerintahan sipil Rusia merupakan seorang yang anti-Islam dan bahkan ateis.[21] Dia memperjuangkan kebangkitan kultural Iran yang didasarkan pada pemisahan dari Islam dan unsur-unsur Arab yang diasosiasikan dengannya, suatu tujuan yang dimiliki bersama dengan pangeran Qajar Jalāl-al-Dīn Mīrzā.[22] Pada 1279/1863, dalam

---

[19] Lihat *Encyclopaedia Iranica* at http://www.iranicaonline.org/articles/ constitutional-revolution-i.

[20] *Encyclopaedia Iranica* at http://www.iranicaonline.org/articles/ constitutional- revolution-i; bandingkan dengan Bayat, *Mysticism and Dissent*, 137-140.

[21] Lihat Bayat, *Mysticism and Dissent*, 136-137.

[22] Ibid., 152-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maktūbāt, dia menyerang Na>s}ir-al-Dīn Sha>h karena ketidaktahuannya tentang kemajuan (*ignorance of progress*), cinta kemewahan, gagal dalam perang, dan salah dalam mengurus pemerintahan, dan mengingatkannya bahwa jika dia tidak mengadopsi hukum modern maka dia akan menghadapi ancaman lain, sejenis pemberontakan gerakan Babisme.

Sementara itu, Kirmānī (1270-1314/1854-96), seorang penulis dan aktifis di lingkaran Istanbul dengan kecenderungan sosialis, juga mendukung pentingnya rejim konstitusional dan budaya sekular, dan bahkan mengantisipasi terjadinya revolusi popular (rakyat). Dia berasal dari latar belakang sufi pinggiran dan dipengaruhi oleh gerakan dan ide-ide Babisme. Dia adalah pengikut al-Afgha>ni> dan pendukung Malku>m, tetapi di atas segalanya dia mempunyai kritik yang sama dengan Akhunza>da> terhadap masa lalu Islam sebagai penyebab utama kemunduran Persia. Penekanan Kirmani terhadap akar-akar Persia pra-Islam sebagai sumber kebangkitan kembali nasional Persia memberikan pengaruh terhadap tulisan-tulisan selama periode konstitusional.[23] Dia dihukum setelah pembunuhan Na>s}ir-al-Dīn Sha>h, dan dia diingat sebagai martir karena penindasan Qajar. Dia dianggap memiliki tempat yang penting dalam genealogi intelektual revolusi konstitusional.

Tema yang paling penting yang muncul dalam tulisan-tulisan akhir abad ke-19 adalah gagasan bahwa untuk menjamin keadilan sosial dan kemajuan material (ekonomi), serta menjaga kemerdekaan Persia dan identitas nasional melawan dominasi imperial Eropa, adalah penting untuk mengusung tatanan konstitusional. Dengan tatanan konstitusional ini, kekuasaan Sha>h akan dibatasi, pemisahan kekuasaan dijalankan, dan fungsi-fungsi dari organ pemerintah dijelaskan. Patriotisme dan pengakuan warisan kultural Persia juga diutamakan sebagai komplementer (pelengkap) atau bahkan alternatif terhadap loyalitas kepada keyakinan (agama) dan kelembagaan kegamaan tradisional.

Sementara itu, pembaruan pemerintahan, militer, pendidikan dan ekonomi yang dijalankan oleh perdana menteri Mīrzā Taqī Kha>n Ami>r Kabīr berkontribusi terhadap terbukanya Persia pada lembaga-lembaga dan ide-ide Barat, tetapi pada saat yang sama membantu mempertahankan monarki yang dicirikan oleh adanya ko-eksistensi antara negara dan ‘ulama selama masa pemerintahan Nāṣir-al-Dīn Sha>h

[23] Ibid., 157-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1848-96), meskipun seringkali menghadapi kekuatan perlawanan rakyat.[24] Meskipun para pendukung pembaruan politik terpinggirkan pada dekade berikutnya dan seluruh gerakan menuju pembaruan sistem politik dilawan, tetapi perlawanan tidak pernah sepenuhnya hilang.[25]

D. Tema-tema Konstitusionalisme

Sampai dekade pertama abad ke-20 dan munculnya nasionalisme Persia pan-Turanisme telah berkembang di kalangan penduduk Azerbaijan di Caucasus, dan pengaruhnya telah dirasakan di Persia melalui para orator revolusioner, jurnalis, satiris di Tabriz. Ḥaydar Kha>n Tārīverdīof, yang lebih dikenal sebagai ʿAm(ū)oḡlī, dan Muḥammad-Amīn Rasūlzāda> keduanya berasal dari partai sosial demokrasi. Banyak pekerja migran Persia di ladang minyak Baku dan tambang Armenia dan Georgia berasal dari partai ini. Para aktifis partai yang belakangan mendirikan cabang-cabang di Tabrīz dan Mashhad.[26]

Tidak kalah berpengaruhnya dalam pembentukan opini publik Persia adalah surat kabar, pamplet dan publikasi buku. Pada pertengahan abad ke-19, dan terutama selama era Mīrzā Ḥosayn Kha>n Sepah-sālār pada 1870-an, pers Persia yang kecil, meskipun dikendalikan oleh pemerintah, secara berkala melaporkan aspek-aspek peristiwa konstitusional dan revolusioner Barat. Pada penutupan dekade abad ke-19 para pembaca Persia secara ringkas dibukakan matanya tidak hanya kepada ekspansi kolonial dan persaingan imperial, tetapi juga kepada krisis konstitusional di Perancis, sistem parlemen Inggris, penyatuan Jerman, pemilihan presiden Amerika Serikat, dan banyak peristiwa revolusioner dan perjuangan kemerdekaan. Media cetak baru yang kecil tapi jumlahnya banyak di kota-kota Persia selama periode Muẓaffar-al-Dīn Sha>h dan setelahnya memainkan peranan penting dalam menyebarkan pesan konstitusionalis kepada publik.

Demikian pula, pers dan institusi pendidikan modern pada periode itu menyediakan *platform* sekular, sebagai alternatif terhadap masjid dan *bāzār*. Dengan inspirasi dari gagasan-gagasan Eropa tentang pendidikan, figur-figur seperti Dawlatābādī dan Mīrzā Ḥasan Rošdīya, bahkan sebelum perdebatan konstitusional,

---

[24] *Encyclopaedia Iranica* at http://www.iranicaonline.org/articles/ constitutional-revolution-i.
[25] Keddie, *Roots of Revolution*, 52-53.
[26] *Encyclopaedia Iranica* at http://www.iranicaonline.org/articles/ constitutional-revolution-i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mulai memperkenalkan sekolah-sekolah modern dan pengajaran ilmu-ilmu pasti dan bahasa-bahasa Eropa. Gerakan ini memperoleh kekuatan lebih jauh dari dukungan yang diberikan oleh kalangan ‘ulama seperti Ṭabāṭabāʾī dan Bihbahānī.

Seperti nanti dapat dilihat, pembentukan pemerintahan konstitusional di Persia merupakan tujuan utama dari revolusi yang berlangsung pada 1323-29/1905-1911. Seperti revolusi besar yang lainnya, Revolusi Konstitusional di Persia meliputi ruang lingkup gagasan dan tujuan yang luas, yang mencerminkan kecenderungan intelektual, latar belakang sosial dan tuntutan politik yang sangat beragam. Bahkan, pada waktu itu naskah konstitusi itu sendiri tidak memiliki dukungan universal. Namun, terlepas dari adanya ketidakjelasan ideologis, Revolusi Konstitusional tetap merupakan sebuah episode yang menciptakan *epoch* dalam sejarah modern Persia karena capaian politiknya dan konsekuensi-konsekuensi sosial dan budaya yang dapat bertahan lama. Jadi, sebagai sebuah revolusi modern, Revolusi Konstitusional bertujuan untuk menghancurkan tatanan lama melalui tindakan popular (rakyat), dan dengan menyebarkan ajaran-ajaran liberalisme, sekularisme dan nasionalisme.

III. DINAMIKA REVOLUSI KONSTITUSIONAL, 1906-1911

A. Konteks Sosio-Historis Revolusi Konstitusional

Kenyataan bahwa revolusi konstitusional merupakan yang pertama di dunia Islam, lebih awal dari pada revolusi Turki Muda pada 1908, untuk sebagian dapat dijelaskan dengan keadaan di Persia pada paruh kedua abad ke-19. Antara 1848 dan 1852, negara dan kelompok keagamaan mampu menahankedua pilihan yang teredia untuk perubahan yang bersifat mendasar. Di satu pihak, gerakan Babisme yang milenarian dan revolusioner (1844-1852) dihancurkan oleh kekuatan militer, meskipun agenda perlawannya terhadap monarki Qajar dan kemapanan klerikal (‘ulama) bertahan dalam bentuk perlawanan yang tidak jelas dan terstruktur.

Peristiwa-peristiwa Menjelang Revolusi Konstitusi. Para pedagang terkemuka memberikan reaksi keras terhadap administrasi bea cukai yang lebih ketat dengan mengadakan demonstrasi di kota-kota besar, khususnya Tabrīz, Tehran, Isfahan, dan Shi>ra>z, antara 1317/1900 dan 1323/1905. Pada 1322/1904 situasi menjadi lebih buruk oleh terjadinya kemerosotan dalam perdagangan dengan Rusia, mitra dagang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting Iran, karena adanya perang antara Rusia dan Jepang. Pada 1323/1905 kekecewaan dan ketidakpuasan, dengan pembaruan bea cukai pada khususnya dan kebijakan fiskal pemerintah pada umumnya, menyebabkan para pedagang mengorganisasi dan mendanai gerakan oposisi di Teheran. Juru bicara utamanya adalah mujtahid terkemuka. Oposisi itu mengambil karakter yang lebih reformis ketika Bihbahānī dan Ṭabāṭabāʾī, mujtahid yang banyak dipengaruhi oleh tujuan pembaruan abad ke-19, ikut bersepakat untuk berkolaborasi pada 25 Ramad}ān 1323/23 November 1905.[27]

Ketika ‘Alāʾ-al-Dawlah, gubernur Tehran, memerintahkan pemukulan dua pedagang pada 14 Šhawwāl 1323/12 Desember 1905, sebagai hukuman karena menaikkan harga gula, dia memberikan semacam *preteks* kepada oposisi untuk melakukan perlawanan secara terbuka. Pada hari berikutnya, kelompok *bāzār* melakukan aksi mogok, dan massa rakyat yang dipimpin oleh Bihbahānī dan Ṭabāṭabāʾī, berkumpul di Masjid Sha>h untuk menuntut pemecatan ‘Alāʾ-al-Dawlah. Kerumunan massa memiliki aspirasi yang berbeda-beda, tetapi sebagian dari mereka juga menuntut dibentuknya sebuah dewan untuk menampung dan menjawab keluhan-keluhan para pedagang. Sayyid Jamāl-al-Dīn Wāʿiẓ Eṣfahānī berbicara kepada kerumunan ketika pengikut dari mujtahid konservatif Ḥājj Mīrzā Abu al-Qāsim Emām-e Jumʿah, pendakwah terkemuka di Masjid Sha>h, mengganggu pertemuan dengan menyerang para jama’ah/pendengar.[28]

Dua hari kemudian, Ṭabāṭabāʾī dan Bihbahānī memimpin kelompok sekitar 2000 orang. Sebagian besar dari mereka adalah anggota dari ‘ulama yang lebih rendah, untuk mencari perlindungan di tempat suci Sha>h ʿAbd al-‘Aẓīm di selatan Tehran. Pada awalnya mereka didanai oleh *bāzār*,[29] tetapi kemudian juga didukung oleh dua aspiran yang menginginkan kekuasaan: Sālār-al-Dawlah Abu> al-Fatḥ Mīrzā dan putra mahkota, Muḥammad-ʿAlī Mīrzā, yang percaya bahwa gerakan tersebut dilakukan untuk melawan perdana menteri ‘Ayn-al-Dawlah, yang tidak dia percayai.[30]

---

[27] Ibid. merujuk *Tārīk-e bīdārī*, ed. Saʿīdī Sīrjānī, I, 272-73, 324.

[28] Lihat Mangol Bayat, *Iran’s First Revolution: Shi‘ismand the Constitutional Revolution of 1905-1909* (New York and Oxford: Oxford University Press, 1991).

[29] *Encyclopaedia Iranica* at http://www.iranicaonline.org/articles/constitutional-revolution-ii; merujuk *Tārīk-e bīdārī*, ed. Saʿīdī Sīrjānī, I, 331-36, 344)

[30] Lihat http://www.iranicaonline.org/articles/constitutional-revolution-ii; E. G. Browne, *Persian Revolution*, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sha>h menerbitkan nota dengan menjanjikan pemulihan berbagai keluhan, tetapi menolak untuk mencopot ‘Ayn-al-Dawlah. Pada pagi hari 21 Jumādā al-U<la>/13 Juli, sebuah prosesi dengan mengenakan pakaian mahasiswa yang meninggal dunia dan terdiri dari orang-orang yang memakai kain kafan lewat melalui *bāzār*. Negosiasi antara Sha>h dan pemimpin dari kalangan ‘ulama reformis berlangsung tanpa hasil sampai 23 Jumādā al-U<la>/15 Juli, ketika yang disebut terakhir berangkat menuju Qum untuk melakukan protes. Peristiwa yang sangat menentukan dalam penghancuran kekuasaan rejim lama adalah *bast* yang besar di kedutaan Inggris di Tehran pada waktu yang hampir bersamaan.

Setelah negosiasi panjang Sha>h pada prinsipnya menyetujui pembentukan majlis, dan pada 7 Jumādā al-Thaniyah /29 Juli ‘Ayn-al-Dawlah mengundurkan diri. Sebagian pembangkang bersiap-siap untuk pergi, tetapi dinasehati oleh para pemimpin untuk tetap bertahan di kedutaan. Dalam konteks ini, pengunduran diri perdana menteri tidak lagi menjadi isu sentral, dan pembaruan yang lebih mendasar, yakni pembentukan sebuah *majles-e mellī*, lebih dibutuhkan. Namun, isunya kemudian lebih menyangkut sejauh mana pembaruan akan dibimbing oleh hukum Islam. ‘Ulama di Qum mengirim telegram kepada Muẓaffar-al-Dīn Sha>h di mana mereka menyatakan tuntutan mereka untuk pembentukan sebuah *majles-e ʿadālat* untuk menjamin keadilan dalam semua urusan, melindungi negara dari campur tangan asing, dan memperkenalkan pembaruan sesuai dengan Shari>‘ah.[31]

B. Dinamika Konstitusionalisme

Perjalanan konstitusionalisme mengalami empat tahapan. *Pertama*, mulai pertemuan-pertemuan awal, protes publik, klandestine pada awal 1323/1905 sampai penyelenggaraan majlis pertama pada Oktober 1906, yang merupakan suatu periode peragian revolusioner di mana kelompok-kelompok yang saling bersaing memperebutkan kepemimpinan; *kedua*, mulai musim gugur 1906, ketika pembicaraan tentang naskah konstitusi terjadi di majlis, sampai kudeta 23 Jumādā al-U<la>I 1326/23 Juni 1908, yang merupakan suatu periode perdebatan yang sengit di majelis dan di masyarakat Persia secara keseluruhan, yang berakhir dengan polarisasi dan perpecahan; *ketiga*, ‘tirani kecil’ (*estebdād-e ṣaḡīr*) sampai restorasi Konstitusi pada 27 Jumādā al-

[31] Ibid. merujuk *Tārīḵ-e bīdārī*, ed. Saʿīdī Sīrjānī, I, 546-548.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thaniyah 1327/16 Juli 1909, yang merupakan suatu periode radikalisasi yang sadar dan perjuangan bersenjata; dan *keempat*, dari restorasi rejim konstitusional sampai ultimatum bersama kekuatan-kekuatan besar dan pembubaran majlis kedua pada 2 Muḥarram 1330/24 Desember 1911, yang merupakan suatu periode politik kepartaian dan kekecewaan.

***Evolusi awal konsep konstitusi*.** Seperti disebutkan terdahulu, tuntutan utama kalangan konstitusionalis adalah dibentuknya sebuah badan perwakilan (majlis) yang otonom untuk menegakkan keadilan dan menjamin hak-hak individu warga berhadapan dengan negara. Pertama, usulan tersebut diserahkan kepada pemerintah ‘Ayn al-Dawlah selama insiden pada 14 Shawwal 1323/11 Desember 1905 di mana para pembelot atau pembangkang berlindung di tempat suci Sha>h ‘Abd al-‘Az}i>m dekat Tehran sebagai bentuk protes melawan pemerintahan yang menuntut pembaruan dalam seluruh urusan negara dengan mempertimbangkan hak-hak ‘ulama, yaitu blok pro-pembaruan yang dipimpin oleh T{abat}aba’i dan Bihbaha>ni>.

Keputusan istana pada Januari 1906 membentuk rumah negara untuk keadilan (‘*ada>lat kha>na-ye dawlati*) bertujuan untuk melaksanakan “peraturan-peraturan Shari>‘ah dan memungkinkan pemulihan keluhan-keluhan rakyat … tanpa membuat pembedaan apapun di kalangan berbagai kelas rakyat.” Meskipun putusan ini mengumandangkan bahasa dari tuntutan awal, tetapi dalam praktik ini tidak berarti banyak dari pada sekedar mereorganisasi kementrian keadilan.

Gagasan pembentukan majelis keadian segera memperoleh sambutan dalam berbagai pidato atau tulisan kelompok konstitusionalis sebagai alat untuk menjamin perwakilan rakyat. Lebih dari itu, gagasan popular tentang majlis dengan sejarah Islamnya yang panjang tidak terhindarkan mencakup dua konsep yang lain, yaitu konsultasi atau *mushawarah* dan representasi atau *wakalat*, yang keduanya memiliki beberapa preseden dalam sejarah Persia-Islam. Gagasan tentang *mushawarah* (konsultasi) dapat ditemukan dalam al-Qur’an, sedangkan konsep *waka>lah* (representasi) memiliki implikasi teologis dan hukum yang luas.

Pada bulan-bulan pertama tahun 1906 fungsi dari majlis yang diusulkan secara bertahap dijelaskan dalam literatur-literatur yang ditulis oleh kelompok pembangkang sebagai deliberasi terhadap *qa>nu>n*, yang merupakan suatu konsep yang luas dan masih samar, yang mengandaikan sebuah konstitusi sekular, juga kodifikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shari>‘ah.[32] Dalam konteks tradisional, *qa>nu>n* menunjuk kepada hukum pemerintahan, keuangan dan pidana di luar wilayah Shari>‘ah dan ditangani oleh pemerintah. Terlepas dari penggunaan istilah *qa>nu>n* yang meluas di kerajaan Turki Uthma>ni>, definisi *qānūn* umumnya ditolak di Persia, di mana ada konsep *‘urf* (hukum adat yang tidak terkodifikasi) yang lebih disukai. Pada akhir abad ke-19, beberapa usaha untuk mengadopsi hukum modern berdasarkan model Tanzimat Uthma>ni> telah gagal untuk membatasi kekuasaan sewenang-wenang dari penguasa dan otoritas judisial ‘ulama.

Penyusunan Konstitusi 1324-25/1906-07. Sebuah badan atau komite bertemu untuk membuat susunan organisasi Majlis. Badan itu mencakup anggota-anggota dari tiga kelompok yang berbeda: kaum bangsawan reformis, termasuk Ṣanīʿ-al-Dawla, Mukber-al-Salṭana, dan Mušīr-al-Mulk, dan beberapa pedagang; ‘ulama yang lebih muda dipimpin oleh anak-anak Ṭabāṭabāʾī; dan kalangan konservatif istana, yang paling terkemuka di antara mereka adalah Amīr Bahādur.[33]

Dalam jeda waktu antara 28 Jumādā al-Thaniyah -18 Rajab/19 Agustus-8 September komite tersebut bekerja untuk menyusun aturan pemilihan umum. Sebuah naskah yang didasarkan pada aturan pemilu dalam konstitusi Belgia diserahkan oleh kelompok Ṣanīʿ-al-Dawla. Meskipun demikian, ‘ulama khawatir aturan tersebut memberikan peran yang tidak memadai untuk kalangan agama, sementara Amīr Bahādur berusaha untuk mempertahankan kekuasaan Sha>h dan membatasi peran Majlis.

Naskah itu pada akhirnya disampaikan kepada Sha>h, dan kemudian ditandatangani pada 19 Rajab/8 September, dan diumumkan pada hari berikutnya. Ketentuan-ketentuan dalam naskah tersebut menyediakan 156 wakil; enam puluh dialokasikan untuk Tehran, yang tampaknya dimaksudkan untuk memungkinkan pembentukan majlis secara cepat. Dari wakil Tehran itu, 32 mewakili gilda, 10 mewakili pedagang, 10 pemilik tanah, 4 ‘ulama, 4 keluarga Qajar. Pemilihan dilaksanakan di ibukota pada 10 Sha‘ban/29 September. Jumlah pemilih tidak lebih dari ratusan di masing-masing 5 kelas (kelompok) sosial, karena adanya persyaratan dan kualifikasi yang berat: harus memiliki harta kekayaan yang tinggi.

---

[32] Ibid. merujuk *Tārīk-e bīdārī* I, 287, 307-08).

[33] Ibid. merujuk *Tārīk-e bīdārī*, ed. Saʿīdī Sīrjānī, I, 573-76; Dawlatābādī, *Ḥayāt-e Yaḥyā* II, 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majlis diresmikan pada 18 Sha`ban 1324 / 7 Oktober 1906, dan anggota majlis memilih Saniʿ al-Dawlah sebagai presiden (ketua) pada hari berikutnya. Saniʿ al-Dawlah segera mengumumkan bahwa penyusunan peraturan internal untuk Majlis dan penyusunan konstitusi itu sendiri lebih didahulukan dari pada urusan-urusan lain.[34] Anggotanya dipilih sesuai dengan dekrit kerajaan tanggal 14 Jumādā II 1324/5 Agustus 1906 dan sesuai dengan undang-undang pemilihan yang disusun oleh komite yang terdiri dari dua anak perdana menteri, Mirza> Hasan Kha>n Musir-al-Mulk dan Mirza> Ḥusayn Kha>n Muʾtamen-al-Mulk, dan Murtażāqulī Kha>n Saniʿ al-Dawlah dan saudaranya Mahdīqulī Kha>n Mukber-al-Saltanah. Komite yang bertugas membuat undang-undang itu mulai bekerja menyusun rancangan atau naskah konstitusi. Ketergesa-gesaan dianggap perlu, mengingat memburuknya kesehatan Muzaffar-al-Di>n Sha>h (1313-24/1896-1907), sehingga Majlis dan Senat yang diusulkan perlu segera dilembagakan (dibentuk) sebelum Sha>h meninggal dunia.

Majelis pertama memperlihatkan adanya faksi-faksi yang terlibat. Faksi yang dominan mencakup Saʿd al-Dawlah, pedagang-pedagang yang terkemuka, dan beberapa orang anggota gilda. Terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan oleh beberapa pengamat kontemporer untuk melihat munculnya partai politik, pola pengelompokan dalam majlis pada tahap tersebut terutama bersifat tradisional. Ṭabāṭabāʾī dan Bihbahānī terus mewakili pandangan-pandangan orang-orang yang kurang diperhatikan, dan faksi-faksi yang dibentuk dan dibentuk kembali sebagai anggota-anggota bekerja sama untuk satu kepentingan khusus, dan juga bersatu dengan yang lain menyangkut isu-isu yang lain.

Tiga dokumen penting –dekrit konstitusional, undang-undang pemilihan umum, dan Konstitusi itu sendiri- didukung oleh Muẓaffar-al-Dīn Sha>h sebelum kematiannya pada 23 Dhul-Qa‘dah 1324/9 Januari 1907. Hal ini berarti bahwa baik keputusan maupun legislasi Majlis tidak akan membahayakan hak prerogatif Sha>h. Baru setelah Muḥammad-ʿAlī pada 28 Dhul-Hijjah 1324/11 Februari 1907 naik tahta, untuk pertama kali Sha>h diminta oleh Majlis untuk mengakui Persia sebagai negara konstitusional (*mašrūṭa*). Setelah tawar menawar menyangkut istilah kebahasaan (semantik), Sha>h memodifikasi teks dekrit (*farmān)* yang diajukan dengan mendefinisikan istilah

[34] Ibid.*Tarik-e Bidari*, ed. Saʿidi Sīrjānī, I, 406-408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mašrūṭa sebagai konstitusi (*constitution*, *konsṭeṭūsīon*), mungkin sebagai pijakan untuk penafsiran istilah *mašrūṭa* yang lebih luas dan memiliki konotasi republik.[35]

Pada permulaan tahun 1907, dua pihak yang berpendirian keras masuk ke arena politik. Di satu pihak, Muḥammad-ʿAlī Sha>h (1324-27/1907-09), yang sangat menentang majlis, naik ke tampuk kekuasaan sebagai Sha>h. Di pihak lain, wakil-wakil dari Tabrīz tiba, dipimpin oleh Sayyid Ḥasan Taqīzāda. Masalah utama yang dihadapi oleh Majlis adalah perdebatan soal definisi pemerintahan konstitusional dan peran otoritas agama (‘ulama). Perdebatan tentang masalah ini mengakibatkan adanya kekacauan serius di Tabrīz, yang dipicu oleh Taqīzāda, dan untuk sementara diselesaikan pada 27 Dhul-Hijjah/11 Februari, dengan penerbitan nota yang menyatakan bahwa pemerintahan Persia harus berbentuk *mašrūṭah*, yaitu konstitusional dalam pengertian parlementer.[36]

Oposisi tersembunyi terhadap Sha>h dan istana ditunjang oleh tumbuhnya ketidakpuasan di kalangan kelompok-kelompok lain yang mendapatkan manfaat dari rejim lama. Sha>h mengambil balik Amīn-al-Solṭān dari pengasingan di Eropa dan menunjuknya sebagai perdana menteri pada April 1907. Tindakan ini memunculkan protes kuat dari Anjoman-e Āḏarbāyjān dan pendakwah reformis terkemuka Naṣr-Allāh Kha>n Malek-al-Mutakallemīn.[37] Amīn-al-Sulṭān sampai di Bandar-e Anzalī di kapal perang Rusia pada 6 Rabī‘ al-U<la>/19 April.

Kekuatan radikal lokal berusaha untuk mencegah mendaratnya Amin al-Sultan, tetapi dia juga mampu meredakan beberapa orang dari kekuatan oposisi dengan menyatakan mendukung konstitusi. Meskipun beberapa orang percaya bahwa dia menggunakan negara untuk melumpuhkan majlis, sebagian yang lain menganggapnya sebagai satu-satunya orang yang mampu merekonsialisasi kelompok-kelompok yang saling berlawanan.[38]

C. Beberapa Ketentuan Dalam Konstitusi[39]

---

[35] Ibid. Hedāyat, 1344 Š./1965, 146-49; cf. *Tārīḵ-e bīdārī* II, 82-85; Taqīzāda, 1349 Š./1970, I, 392.

[36] Ibid. *Tārīḵ-e bīdārī*, ed. Saʿīdī Sīrjānī, II, 82-86; Kasrawī, *Mašrūṭa*, 217-23).

[37] Ibid. merujuk Kasrawī, *Mašrūṭa*[3], 251).

[38]Ibid. merujuk Hedāyat, 202-08; Kasrawī, *Mašrūṭa*[3], 281.

[39] Pembahasan tentang ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi sebagian besar merujuk ke http://www.iranicaonline.org/articles/constitutional-revolution-iii; “the constitution”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusi atau hukum konstitusional 1906 terdiri dari pembukaan pendek dan lima puluh satu pasal, setidaknya enam di antaranya (pasal 12, 31-32, 34, 46, 48) saling berhubungan, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan pasal-pasal dalam konstitusi Belgia. Setidaknya lima pasal (pasal 13, 18, 23, 25, 42) berhubungan dengan ketentuan dalam konstitusi Bulgaria tahun 1879, meskipun tidak ada satu pun yang merupakan terjemahan harfiah,*verbatim*. Gagasan legislatif bikameral (dua kamar), yang terdiri dari kamar wakil-wakil (Majlis) dan senat, juga diambil dari konstitusi Belgia, meskipun persyaratan bahwa setengah anggota Senat itu diangkat oleh Sha>h menunjukkan beberapa pengaruh dari konstitusi Rusia yang diumumkan oleh Tsar lebih awal pada tahun 1906.

Bagian yang berjudul “Tentang pembentukan Majlis” (pasal 1-14) mendirikan *Majles-e Sura-ye Melli* (majlis konsultatif nasional), yang terdiri dari 162 wakil dari Teheran dan provinsi-provinsi, yang dipilih untuk dua tahun dan untuk mengadakan persidangan di ibukota. Pasal 7 mensyaratkan kuorum dua pertiga dari anggota untuk dimulainya persidangan dan tiga perempat untuk mengambil suara. Pasal 12 menjamin para wakil punya kekebalan parlementer. Pertimbangan Majlis itu harus publik (pasal 13), meskipun di tempat lain dalam penyediaan dokumen dibuat untuk pertemuan tertutup di bawah keadaan yang tidak biasa (pasal 34-35).

Bagian berikutnya (pasal 15-31) berjudul "Tentang fungsi, batas, dan hak Majlis." Majlis diberi kekuasaan legislatif (pasal 16, 21), dalam hubungannya dengan Senat (pasal 17, 19), dan hak untuk mengajukan legislasi (pasal 15). Pasal 18 dan 22-26 mencerminkan salah satu tujuan utama dari konstitusionalis: penegasan hak Majlis untuk menyetujui perjanjian internasional dan konsesi ekonomi, dan untuk mengontrol sumber daya alam negara dan keuangan pemerintah. Pasal 18 (diadaptasi dari pasal 105,3-5 dari konstitusi Bulgaria) menyatakan pengenaan pajak, organisasi urusan keuangan, dan anggaran tahunan tunduk pada persetujuan oleh Majlis. Persetujuan juga diperlukan untuk semua transaksi yang melibatkan barang milik negara dan sumber daya nasional (pasal 22), untuk pembentukan perusahaan publik (pasal 23), untuk perjanjian dan konsesi (pasal 24), untuk semua pinjaman pemerintah (pasal 25, diadaptasi dari pasal 123 dari konstitusi Bulgaria), dan untuk pembangunan rel kereta api dan jalan (pasal 26) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian akhir, "tentang syarat-syarat pembentukan Senat" (pasal 43-48), memuat ketentuan bahwa Senat terdiri dari enam puluh anggota (pasal 43), separuh dari Teheran dan separuh lagi dari provinsi-provinsi, dan harus bertemu bersamaan dengan Majlis. Sha>h menunjuk setengah anggota senat dari setiap kategori (kelompok sosial), dan sisanya akan dipilih oleh rakyat (pasal 45). Hukum yang berkaitan dengan keuangan diserahkan kepada Majlis, meskipun Senat harus diberitahu dan dapat memberikan nasihat.

Penyusunan ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama kaum konstitusionalis adalah membatasi kekuasaan Sha>h yang absolut. Keberlanjutan monarki diterima secara umum dengan merumuskan hukum konstitusi: dalam pasal-pasal 15, 17, dan 47 ratifikasi hukum oleh Sha>h disebutkan, dan dalam pasal-pasal 28-29 otoritas Sha>h atas para menterinya, tetapi tidak ada definisi yang sistematis mengenai peran raja (Sha>h). Definisi diberikan dalam suplemen: Sha>h adalah kepala eksekutif (pasal 27), dan komandan tertinggi kekuatan bersenjata (pasal 50); dia punya hak untuk membuat pernyataan resmi perang dan untuk mengumumkan damai (pasal 51) tetapi terbebas dari tanggungjawab pemerintahan (pasal 44).

Namun, Sha>h diberikan hak veto yang tidak eksplisit atas legislasi, dan dalam pasal 49 dinyatakan secara samar-samar bahwa pengeluaran dekrit dan perintah untuk melaksanakan hukum menjadi hak raja, asalkan dia tidak menunda pelaksanaannya. Pasal 35 menyatakan bahwa monarki merupakan titipan yang diberikan kepada pribadi raja oleh negara, yang oleh putra mahkota Moḥammad-ʿAlī, ditambahkan kata-kata “melalui pemberian Tuhan.” Terlepas dari tambahan ini, prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang terbatas (*mašrūṭīyat*) telah dibentuk melalui konstitusionalisme.

Undang-undang pemilu pertama tersebut digantikan oleh undang-undang tertanggal 12 Jumādā al-Thaniyah 1327/1 Juli 1909. Di situ ditetapkan jumlah wakil di Majlis 120 orang, termasuk satu wakil untuk masing-masing konstituen 5 suku (Šāhsevan, Qašqāʾī, Ḵamsa, Turkman, and Baḵtīārī) dan 4 kelompok minoritas agama (Armenia, Assyria, Kristen, Zoroastrian, dan Yahudi). Umur minimun untuk pemilih dikurangi, menjadi 22 tahun. Pemilih harus memiliki kekayaan senilai paling tidak 250 *tomans*, membayar 10 *tomans* pada pajak, menerima pendapatan tahunan 50 *tomans*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau harus terdidik. Pemilihan harus dilaksanakan dengan kotak rahasia dalam dua tahapan.

Undang-undang tahun 1327/1909 digantikan pada giliran berikutnya oleh undang-undang pemilu 28 Shawwal 1329/21 November 1911, di mana hak pilih kaum laki-laki diperkenalkan: kekayaan dan kualifikasi pendidikan dibuang, dan pemilih harus sudah tinggal di daerah pemilihan selama paling sedikit 6 bulan sebelum pemilihan. Pemilihan harus bersifat langsung, dan jumlah wakil ditetapkan 136, dipilih dari 82 daerah pemilihan. Tehran dan wilayah sekitarnya dialokasikan 15 kursi, Tabriz dan wilayah sekitarnya 9 kursi.

IV. RESPON ‘ULAMA TERHADAP REVOLUSI KONSTITUSIONAL

A. Posisi ‘Ulama Dalam Politik Konstitusionalisme

‘Ulama memainkan peranan penting dalam kehidupan politik di Iran sejak 1501 ketika Sha>h Isma‘il, penguasa Safawiyyah, menjadikan Shi>‘ah sebagai agama negara. Ini tidak terlepas dari posisi ‘ulama sebagai bagian dari struktur elite dalam masyarakat Shi>‘ah. Dengan kualifikasinya sebagai ahli agama atau *mujtahid*, ‘ulama menjadi sumber rujukan bagi orang-orang Shi>‘ah, karena mereka memerankan diri sebagai *na’ib ‘amm* Imam yang ghaib (Mahdi).[40]

Posisi penting tersebut terus bertahan sampai periode Qajar. ‘Ulama mengajar, menafsirkan dan menjalankan hukum Islam, mengelola lembaga pendidikan tradisional, memimpin shalat (imam) di masjid, menjadi penjaga tempat-tempat suci Shi>‘ah, pemilik tanah yang makmur dan pengelola wakaf.[41] Sebagai bagian dari elite masyarakat, ‘ulama memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan, kaum pedagang, sekaligus dengan seluruh lapisan masyarakat. Hubungan simbiotik antara ‘ulama dan kekuasaan (monarki) didasarkan pada subordinasi ‘ulama kepada negara. ‘Ulama memberikan legitimasi kepada penguasa Qajar. Mirza Muhaqqiq Qummi -seorang ulama berpengaruh pada era Qajar- misalnya menyatakan bahwa kerajaan merupakan pemberian Tuhan.[42]

---

[40] Said Amir Arjomand, *The Shadow of God and the Hidden Imam* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1984).

[41] Milani, *The Making of Iran’s Islamic Revolution*, 8.

[42] Arjomand, *The Shadow of God and the Hidden Imam*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama periode Qajar, hubungan ‘ulama dengan kaum pedagang dan serikat pekerja (*asnaf, guilds*) juga berlangsung saling menguntungkan. Kaum pedagang dan *asnaf* mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah yang dikelola oleh ‘ulama. Mereka membutuhkan ‘ulama sebagai penasehat hukum dan sebagai hakim untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Pada saat yang sama, ‘ulama membutuhkan kaum pedagang dan *asnaf* karena dukungan dan kontribusi finansial mereka. Aliansi antara ketiga kelompok sosial ini merupakan fenomena yang sangat umum. Keberadaan masjid di pasar (*bazar*) pada masa tersebut merupakan simbol dari hubungan yang saling menguntungkan antara ‘ulama dan pedagang.[43]

Pada Februari 1906, seluruh kelompok yang terlibat dalam kekacauan politik di Tehran, secara terbuka atau tertutup, telah mengesampingkan perbedaan-perbedaan ideologis atau personal mereka untuk berkonsentrasi pada satu isu, yaitu pembentukan rumah keadilan (*‘adalat-Kha>na*), yang dalam hal ini disebut majlis. Meskipun pada tahap ini majlis memiliki arti berbeda-beda menurut kelompok yang berbeda-beda, istilah itu menjadi titik tolak bersama bagi semua pihak atau kelompok dalam menjatuhkan ‘Ayn al-Dawlah dari kekuasaan (jabatan perdana menteri), baik sebagai tujuan dalam dirinya sendiri atau sebagai cara untuk memperoleh tujuan yang lebih luas.

Di antara ‘ulama terkemuka di Tehran, Bihbaha>ni> ingin mendapatkan kembali pengaruhnya di lingkaran kekuasaan, yang dia bisa dapatkan dengan kembalinya Ami>n al-Sult}a>n sebagai perdana menteri. Bihbaha>ni> memang dikenal sangat dekat denga Ami>n al-Sult}a>n. Demikian pula, kemenangan spektakuler gerakan yang dia dukung sejak awal dapat membantunya untuk meneggelamkan bintang yang sedang bersinar dari pesaingnya, Faz}lulla>h Nu>ri>, yang saat itu menduduki jabatan tinggi di istana dan di kantor pemerintahan, dan sangat dekat dengan ‘Ayn al-Dawlah.

Faz}lulla>h Nu>ri> sendiri telah mulai mempertimbangkan gerakan berikutnya dengan hati-hati dalam permainan politik yang rumit. Beberapa insiden kecil telah menempatkannya berhadapan dengan perdana menteri ‘Ayn al-Dawlah. Menurut laporan, dia menyampaikan secara pribadi ketidak-sukaaanya dengan penyalahgunaan kekuasaan tiranik dan korupsi yang terjadi di kalangan pemerintahan dan pejabat istana.

---

[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut, Nu>ri> secara politik cukup cerdik menyadari bahwa suasana hati untuk perubahan telah menyebar, dan bahwa hubungannya yang eksklusif dan istimewa dengan ‘Ayn al-Dawlah mungkin membuktikan kekurangannya dalam peristiwa pencopotan perdana menteri itu dari jabatannya.

Sementara itu, kelompok ‘ulama yang lain seperti Bihbaha>ni>, T{abat}aba’i> dan para pengikut mereka mungkin memiliki hasil politik yang lebih tampak dalam fase-fase historis dinasti Qajar pada awal abad ke-20. T{abat{aba’i> semakin dipengaruhi oleh masyarakat rahasia (*anjoman*) yang dia sendiri merupakan anggotanya. Asal-usul radikal dari pidato-pidato dan ceramahnya tumbuh sangat jelas nyata. Dia bekerja sama dengan kelompok pembangkang, mengkordinasi tindakan dan pernyataan politiknya dengan program-program mereka (*anjoman*). Anak-anaknya, Abul al-Qasim dan Muh}ammad Sadiq, memainkan peranan penting dalam gerakan tersebut, dan seringkali bertindak sebagai kontaknya dengan kelompok-kelompok yang lain. Namun demikian, terlepas dari popularitasnya dan ketulusan motifnya, para pemimpin *anjoman* mengetahui dengan baik bahwa T{abat}aba>’i> tidak punya watak dan kemampuan komunikasi interpersonal yang diperlukan untuk kepemimpinan yang efektif.[44]

Selain itu, T{abat{aba’i> dipandang sebagai orang yang berpikiran terbuka, mendukung kebebasan dan keadilan, tidak korup, meskipun naif, dan mudah dipengaruhi oleh berbagai pandangan, mendukung satu atau yang lain, dan karena itu sering bertentangan dalam dirinya sendiri. Bahkan dia juga dinilai punya watak yang temperamental. Dia tidak memiliki bakat organisasi yang sering ditunjukkan oleh Bihbaha>ni> yang dengan cerdik menggunakannya untuk mempromosikan tujuan-tujuan yang dia pilih untuk mengidentifikasi dirinya. Bihbaha>ni>, dengan kekuatan pribadinya dan kemampuannya untuk memainkan dengan mudah labirin (suatu susunan yang membingungkan) politik Tehran, muncul sebagai pemimpin dari ‘ulama konstitusionalis.

Terlepas dari perbedaan di antara mereka berdua dalam temperamen dan prinsip-prinsip, Bihbaha>ni> dan T{abat{aba’i>, selama periode *detente* (pengenduran) antara istana dan ‘ulama yang ikut dalam migrasi kecil, bekerja sama sangat baik dan erat. Seringkali hal ini terbukti sangat krusial terutama dalam menghadapi plot ‘Ayn al-

[44] Mangol Bayat, *Iran’s First Revolution: Shi‘ism and the Constitutional Revolution of 1905-1909* (New York and Oxford: Oxford University Press, 1991), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dawlah untuk memecah belah mereka berdua. Ketika ketegangan mulai meningkat pada musim semi 1906 dan tekanan itu terus-menerus diberikan pada ‘ulama untuk memperbarui upaya mereka melawan ‘Ayn al-Dawlah dan menuntut pembentukan majlis, dua mujtahid itu mengakui perlunya membentuk barisan ‘ulama yang bersatu. Bahkan, mereka memutuskan untuk mengusahakan rekonsiliasi dengan Faz}lulla>h Nu>ri>.

Karena itu, ketiganya bertemu secara pribadi di rumah milik Faz}lulla>h Nu>ri>, di mana Bihbaha>ni> dan T}abat}aba'i menjelaskan tujuan gerakan politik mereka dan meminta dukungan penuh dari rekan mereka yang kuat pengaruhnya itu. Faz}lulla>h Nu>ri> memberikan dukungan dan berjanji untuk memutuskan hubungan dengan ‘Ayn al-Dawlah. Karena diyakinkan oleh rival mereka, maka Bihbaha>ni> dan T{abat{aba’i> siap untuk meningkatkan kampanye mereka melawan menteri (‘Ayn al-Dawlah).[45]

Gerakan ini akhirnya muncul sebagai oposisi bersatu yang efektif melawan ‘Ayn al-Dawlah, yang melibatkan kelompok-kelompok yang berbeda, orang awam dan kalangan ‘ulama, dengan beragam kepentingan. Semua bersatu mengusung bendera konstitusionalisme dan pemerintahan perwakilan. Seorang penulis kronik tentang revolusi konstitusional, *Tarikh-e Bidariye Iraniyan*, Na>z}im al-Isla>m, seperti dikutip Mangol Bayat, menulis: "Pada hari-hari ini, orang-orang yang dulunya mencari nafkah dari tirani" harus berbalik menjadi konstitusionalis. Na>z}im al-Isla>m khawatir motif rahasia dari individu-individu tersebut mungkin memerlukan satu penciptaan tirani baru dari rezim despotik lain.[46]

Meskipun demikian, Na>z}im al-Isla>m yakin bahwa kaum intelektual akan melihat semua kelompok, termasuk ‘ulama, dan menjaga mereka di bawah kontrol yang ketat. Memang, Na>z}im al-Isla>m dan sesama pembangkang sepenuhnya menyadari potensi keuntungan dari dukungan "orang kuat" yang akan dibawa ke tujuan mereka, mendukung upaya mereka untuk memperkuat kehendak mujtahid, mencapai berbagai lapisan masyarakat, perkotaan dan pedesaan, serta membangkitkan massa. Dukungan diharapkan datang dari para pemimpin suku, pedagang muslim, Zoroaster kaya, yang merupakan lawan politik ‘Ayn al-Dawlah. Menurut *Tarikh-e Bidariye Iraniyan*, Rusia dan Inggris juga menawarkan uang tunai kepada para pembangkang. Kaum "patriot"

[45] Ibid., 124.
[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginginkan reformasi pemerintah; beberapa faksi politik dan kelompok sosial mengharapkan pemberhentian ‘Ayn al-Dawlah dan pengangkatan kembali Ami>n al-Sulta>n.[47]

Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu, pada 5 Agustus 1906 Muz}affar al-Di>n Sha>h menandatangani pernyataan yang memerintahkan pembentukan Majlis yang bertugas untuk menyusun konstitusi. Pada 30 Desember 1906, beberapa hari sebelum meninggal, Sha>h menandatangani konstitusi tertulis pertama Iran. Konstitusi yang mencakup “Supplementary Law” itu merupakan produk dari kompromi antara pembaru sekular dan ‘ulama. Para pembaru sekular yang menghendaki sistem monarki konstitusional gaya Eropa memanipulasi ‘ulama untuk mencapai tujuan yang tidak mungkin dapat mereka capai secara sendirian. Menurut Milani, ‘ulama berpartisipasi dalam gerakan karena pandangan “miopik” (sempit) mereka tentang konstitusionalisme dan keinginan mereka untuk diakui sebagai pendukung dari ide-ide progresif.[48]

Menurut Lahidji, kaum ‘ulama sejatinya tidak memiliki gagasan dan pemahaman yang jelas tentang pemerintahan konstitusional dan kedaulatan nasional, karena pemahaman mereka mengenai dasar-dasar filsafat politik yang baru itu sangat terbatas. Pertarungan antara reformis progresif dan kelompok ‘ulama mengenai “Supplementary Law” juga menghasilkan perbedaan di kalangan ‘ulama, dan akhirnya melahirkan faksionalisme. Hal ini juga berkaitan dengan persaingan kepemimpinan, khususnya antara Shaykh Faz}lulla>h Nu>ri> dan Sayyid ‘Abdullah Bihbaha>ni>. Jadi, Bihbaha>ni>, T{abat{aba’i>, dan Mirza> Muh}ammad H{asan Na>‘ini>, dianggap mewakili ‘ulama konstitusionalis, sedangkan Shaykh Faz}lulla>h Nu>ri> mewakili ‘ulama absolutis.[49]

B. ‘Ulama Pro-Konstitusionalisme sebagai Blok Historis

Peran penting yang dimainkan oleh ‘ulama dalam Revolusi Konstitusional (1906-1911) terutama pada fase-fase awal cukup jelas. Aliansi yang terjadi pada November 1905 oleh dua mujtahid Teheran berpengaruh, yaitu Bihbaha>ni> dan

---

[47] Ibid., 124.

[48] Milani, *The Making of Iran’s Islamic Revolution*, 29.

[49] Abdol Karim Lahidji, “Constitusionalism and Clerical Authority,” dalam Said Amir Arjomand (ed.), *Authority and Political Culture in Shi’ism* (Albany: State University of New York Press, 1988), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

T{abat{aba'i>,[50] yang berhasil menggulingkan perdana menteri saat itu, 'Ayn al-Dawlah, seringkali dipandang sebagai *starting point* revolusi konstitusional. Jadi, dukungan 'ulama terhadap pembaruan politik dengan pembentukan pemerintahan konstitusional sangat jelas. Bihbaha>ni> dan T{abat{aba'i> didukung oleh tiga 'ulama lainnya yang tinggal di Najaf yang menyetujui dan mendukung konstitusialisme: 'Abd Alla>h Mazandara>ni> (w.1912), Akhund Muh}ammad Ka>z}im Khura>sa>ni> (w.1911), dan Hajji Mirza> H{usayn Khali>li> T{ihra>ni> (w.1908). Kegiatan mereka mendukung konstitusionalisme berlanjut sepanjang periode yang disebut sebagai *istibda>d saghi>r*, dari Juni 1908-Juli 1909.

Para mujtahid pro-konstitusi mencari aliansi dengan para aktifis, tidak hanya karena keyakinan liberal mereka sendiri tetapi juga karena mereka menemukan dalam dakwah mereka saluran untuk memperbesar posisi popular mereka sendiri. Aliansi ini didukung oleh pedagang bazar dan kelompok bangsawan yang berpikiran reformis. Pada kudeta Juni 1908 Muḥammad ʿAlī Sha>h (1324-27/1907-09) berhasil menghancurkan inti Babi (pengikut Babisme) dari kelompok ini, yang dianggap (oleh dirinya dan pemimpin agama konservatif Faż}lullāh Nūrī) melakukan kesalahan karena melakukan tindakan radikalisme di dalam dan di luar Majlis.

Terdapat 'ulama yang lain mendukung Konstitusi. Tiga mujtahid senior di kota-kota suci Iraq, Akhund Muh}ammad Ka>z}im Khurasani dan sekutunya 'Abdulla>h Mazandara>ni> dan Muḥammad H{usayn Tehra>ni> mendefinisikan Konstitusi sebagai *ešterāṭ* (dari akar kata yang sama dengan *mašrūṭah*, *conditionalism*, sebagai lawan dari *estebdād*, "tirani"). Dalam pernyataan mereka mendukung Majlis dan pencelaan mereka terhadap anti-konstitusionalisme yang ditunjukkan oleh Muḥammad-ʿAlī Sha>h dan Nūrī, para 'ulama itu munjustifikasi *qānūn* dan *mašrūṭah* atas prinsip mencegah kemunkaran. Dalam *fatwā* bersama setelah kudeta Juli 1908 mereka menyatakan: "adalah keniscayaan agama bahwa selama masa *ghaybah* pemilik zaman (Ṣāḥeb-al-Zamān) pemerintahan kaum Muslim harus berada di tangan para wakil orang-orang Muslim (*jomhūr moslemīn*).[51]

Sementara itu, Muḥammad H{usayn Na>'ini>, seorang 'ulama penganjur konstitusionalisme yang terdidik sebelum 1329/1911, berpendapat dalam *Tanbīh al-*

[50] Vanessa Martin, *Islam and Modernism: The Iranian Revolution of 1906* (Syracuse: Syracuse University Press, 1989), 57-58.

[51] Lahidji, "Constitusionalism and Clerical Authority,"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ummah wa Tanzīh al-millah bahwa, meskipun tidak mungkin pada masa *ghaib*-nya Imam untuk menegakkan keadilan dan persamaan, dan meskipun setiap kekuasaan politik harus dilihat sebagai perampasan otoritas yang adil dari Imam (*welāyat*), adalah menjadi kewajiban ‘ulama untuk memilih bahaya yang lebih ringan (kecil).

C. ‘Ulama Anti-Konstitusionalisme sebagai Blok Historis

Tidak semua ‘ulama mendukung konstitusionalisme, karena terdapat juga mereka yang menentang teori dan praktik konstitusionalisme secara tajam. Salah satu yang paling berpengaruh –seperti telah disebutkan- adalah Faz}lulla>h Nu>ri>. Nu>ri> tergolong mujtahid paling berpengaruh di Tehran. Dia pernah tinggal lama di ‘*Atabat* (kota-kota suci di wilayah Iraq), dan baru kembali ke Iran pada 1900. Namun, dia tidak berasal dari keluarga yang berpengaruh di Tehran, tetapi keluarganya banyak berasal dari ‘*Ataba>t*. Dia tidak menerima penghasilan dari wakaf atau koneksi pasar, tetapi dari bayaran (gaji) karena melaksanakan tugas-tugas keagamaan. [52]

Nu>ri> terlibat dalam protes tembakau dengan ‘ulama yang lain, tetapi tidak terlibat dalam politik lagi sampai 1898 ketika dia bergabung dengan Mirza> H{asan Ashtiya>ni> menentang kebijakan hutang Ami>n al-Dawlah yang membatasi pengaruh ‘ulama.[53] Meskipun pada tahap-tahap awal Nu>ri> terlibat dalam gerakan konstitusionalisme, tetapi pada musim semi 1907 dia mulai berbalik menentang konstitusionalisme. Dia menyatakan bahwa tujuan awal gerakan konstitusional, yaitu pembentukan majlis yang hendak menerapkan hukum Shari>‘ah, telah di-subversi dengan munculnya anggota aliran baru dan kaum naturalis (sekularis) dari kelompok konstitusionalis.

Pada periode setelah kudeta pada Juni 1908, Faz}lulla>h Nu>ri> memberikan dukungan terbuka kepada Sha>h. Dia berpihak pada posisi absolutis bukan karena dia percaya pada absolutisme, tetapi karena dia menganggapnya sebagai cara paling baik untuk melindungi Islam melawan musuh-musuh Shari>‘ah, yakni paham konstitusionalisme dan pendukungnya. Dalam perdebatan di Majlis, Nu>ri> mengajukan argumentasi yang menolak konstitusionalisme karena dinilai bertentangan dengan doktrin Islam (Shari>‘ah).[54]

---

[52] Lahidji, “Constitusionalism and Clerical Authority.”
[53] Martin, *Islam and Modernism*, 58.
[54] Ibid., 165 dan 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shaykh Faz}l-Allāh Nūrī memandang *mašrūṭah*, pertumbuhan sekularisme di Majlis, dan sentimen anti ‘ulama di kalangan *anjoman* dan di pers sebagai sangat merugikan Shari>‘ah dan supremasi para wakilnya. Banyak ‘ulama setuju dengan pandangan ini. Perlawanan Nūrī terhadap *mašrūṭah* juga diprovokasi oleh pengaruh dan poplaritas rival utamanya, Bihbahānī.

D. Relasi-relasi Sosial dan Ekonomi

Peristiwa-peristiwa sejarah dalam masyarakat Persia yang mayoritas Shi>‘ah mengisyaratkan kuatnya kaitan antara agama dan politik. Karena itu, ketika wilayah politik disubordinasikan kepada ajaran agama, praktik *taqlid* memiliki konsekuensi politik yang sangat penting. Mujtahid, dalam kapasitasnya sebagai *marja‘*, berhak untuk memberikan petunjuk tentang urusan politik dalam pengertian yang berlawanan dengan kehendak negara dan *ipso facto* menjadi pemimpin oposisi. Konsep blok historis yang mencerminkan adanya relasi-relasi sosial dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya revolusi dan respon ‘ulama yang berbeda-beda terhadap konstitusionalisme.[55]

Penjelasan tentang konsep *taqlid* dan mujtahid (dalam pengertian Shi>‘ah yang khusus) merupakan prestasi dari Aqa Muhamamd Baqir Bihbaha>ni> (1703-1803), yang dikoneksikan oleh jalur langsung leluhur intelektual dan spiritual dengan ‘ulama pada masanya. Klarifikasi teoretis dari posisi mujtahid sebagai *marja‘ taqlid* terjadi pada permulaan kekuasaan Qajar, dan implikasi politiknya secara progresif menjadi lebih jelas sepanjang abad ke-19. Raja secara teoretis terikat untuk tunduk kepada petunjuk yang otoritatif dari mujtahid dan akibatnya menjadikan negara sebagai cabang eksekutif dari kekuasaan ‘ulama. Sepanjang periode Qajar, tujuan ideal ini tetap tidak bisa dipenuhi, dan karena itu terdapat ketegangan tertentu yang inheren dalam hubungan antara ‘ulama dan monarki. Partisipasi ‘ulama dalam revolusi konstitusional

[55] Ervand Abrahamian mengembangkan analisis kelas (class struggle) untuk menjelaskan faktor-faktor terjadinya revolusi konstitusional. Lihat Ervand Abrahamian, “The Causes of the Constitutional Revolution in Iran.” *International Journal of Middle East Studies*, vol.10, no. 3 (Aug., 1979): 381-414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk sebagian dapat dipandang sebagai tanda yang ketegangan ini telah membuka jalan kepada terjadinya perpecahan terbuka.[56]

Seperti telah disebutkan terdahulu, ‘ulama memainkan peranan penting dalam peristiwa-peristiwa yang berpuncak pada revolusi konstitusional. Menurut Martin, beberapa studi menunjukkan bahwa partisipasi mereka dalam proses tersebut sangat dimotivasi oleh kesadaran Shi>‘ah tentang adanya ketidakadilan, dan bahwa revolusi itu sendiri adalah pemberontakan melawan penindasan oleh rejim Qajar. Namun, pengkajian lebih mendalam akan menunjukkan interpretasi yang berbeda, bahwa revolusi muncul dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah, dan kebutuhan untuk reformasi dan modernisasi dan karena itu menaikkan pajak, dan bahwa respons ‘ulama terhadap situasi tersebut dibentuk oleh faktor-faktor yang lebih kompleks dari pada masalah legitimasi semata, seperti relasi sosial, ekonomi, dan kekuasaan.[57] Relasi sosial itulah yang meng-hegemoni kesadaran ‘ulama untuk memberikan respon dan melakukan tindakan terhadap konstitusionalisme.

Dalam kenyataan, ‘ulama tidak menjadi kekuatan yang utuh dan tunggal dalam respon mereka terhadap konstitusionalisme. Ada persaingan di kalangan mereka dan perbedaan pendapat yang di kalangan mujtahid disebabkan oleh naiknya ‘Ayn al-Dwlah ke tampuk kekuasaan. Ini berkaitan dengan relasi kekuasaan yang dimiliki oleh ‘ulama.

Respon yang berbeda dari ‘ulama terhadap konstitusionalisme (pro- dan anti-konstitusionalisme), menurut Arjomand –seperti dikutip Vanessa Martin- bersifat superfisial, dan disebabkan oleh faktor-faktor yang bervariasi. Beberapa ‘ulama bahkan tidak mempertahankan posisi mereka secara konsisten. Salah satu faktor penting adalah finansial. Sumber utama ‘ulama adalah lembaga wakaf, sumbangan dari kaum muslim, gaji dari pelayanan hukum, gaji dan pensiunan. Jumlah ‘ulama sangat banyak, dan persaingan untuk memperoleh akses finansial itu juga sangat tajam.

Dua pemimpin ‘ulama yang diakui sangat luas dari revolusi konstitusional berasal dari keluarga ‘ulama yang tua dan kuat yang otoritasnya atas komunitas agama –meskipun diakui- mulai terancam oleh mujtahid pesaingnya. Ṭabāṭabāʾī adalah figur

---

[56] Hamid Algar, “The Oppositional Role of the Ulama in Twentieth-Century Iran,” in Nikki R. Keddie (ed.), *Scholars, Saints, and Sufis: Muslim Religious Institution in the Middle East Since 1500* (Berkeley: University of California Press, 1972), 235.

[57] Martin, *Islam and Modernism*, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkenal yang ayahnya bersimpati kepada Malkum, dan dia sendiri menunjukkan kecenderungan liberal sejak periode akhir Nāṣir-al-Dīn Sha>h. Bihbahānī adalah mujtahid yang berpengaruh yang seruannya untuk pembaruan politik dimotivasi oleh kepentingan mendapatkan manfaat (expedience) dan juga keyakinan liberal yang sejati.

Kemenangan pertama kaum konstitusionlais –persetujuan Muzaffar al-Di>n Sha>h untuk membentuk *'adalat-Kha>na* (*House of Justice*) pada Januari 1906, pemecatan 'Ayn al-Dawlah pada Agustus 1906, dan pembukaan Majlis pertama setelah itu – tidak akan pernah terjadi tanpa gerakan massa yang dipimpin oleh Bihbaha>ni>, T{abat{aba'i> dan kolega mereka dari kalangan 'ulama.[58] Dedikasi Ṭabāṭabā'ī yang sangat kuat itu hanya sesaat dimiliki bersama oleh 'ulama yang lain. Mujtahid yang sangat tinggi tingkatannya mau mendukung pembaruan politik hanya jika pembaruan itu memberi mereka kontrol lebih besar atas kehidupan publik, dan terpikat kepada gerakan revolusioner karena takut pengaruh mereka pindah ke para pendakwah radikal dan intelektual sekular. Kritik tajam terhadap mujtahid karena kekolotan mereka, korupsi dan kolaborasi mereka dengan istana telah meletakkan mereka termasuk orang-orang yang bersikap mendua dalam sikap defensif mereka sejak awal.

Pendapatan ekonomi 'ulama sangat bervariasi dan bertingkat, sehingga bisa jadi hal tersebut menimbulkan kesenjangan ekonomi antara satu 'ulama dan lainnya. Apalagi, sebagian sumber-sumber ekonomi itu tidak berada di bawah kontrol mereka, tetapi di bawah Sha>h atau orang biasa yang kaya. Tidak jarang, 'ulama harus berpendapat sesuai dengan kehendak masyarakat pemilik uang agar mereka tetap memperoleh penghasilan.[59]

Motif dari sikap 'ulama terhadap konstitusionalisme juga berbeda-beda. Faz}lulla>h Nu>ri> sendiri adalah satu dari tiga 'ulama (*mujtahid*) yang ikut berperan membentuk Majlis. Dia adalah pendukung setia 'Ayn al-Dawlah sampai perdana menteri tersebut terbukti lemah dan tidak punya kuasa. Dia mendukung Majlis, karena jika tidak niscaya dia akan terisolasi. Naiknya Sha>h yang baru dan munculnya doktrin konstitusional membuatnya bersikap anti konstitusionalisme pada 1907. 'Ulama lain juga mengubah posisi mereka untuk alasan ideologis. Shaykh Murtaza Ashtiyani dan

[58] Hamid Algar, "Religious Forces in Twentieth-Century Iran," *The Cambridge History of Iran 7* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 733.

[59] Martin, *Islam and Modernism*, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mirza Muh}ammad Riza Qummi berhenti dari kegiatan politik ketika mengetahui implikasi konstitusionalisme menjadi jelas.

Sementara itu, Bihbaha>ni> tampak lebih peduli dengan prestise dan posisinya dan dengan memperbesar kekuatan dan pengaruhnya sendiri. Dia melihat bahwa pertumbuhan hak-hak istimewanya sangat tergantung pada pembatasan hak-hak dan otoritas raja Qajar.[60] Bihbaha>ni> adalah seorang mujtahid berpengaruh yang ajakannya kepada pembaruan politik dimotivasi oleh asas kemanfaatan (*expedience*) dan pandangan liberal. Lebih awal, selama periode protes tembakau, dia telah menolak mendukung fatwa yang melarang penggunaan tembakau, yang berarti dia berada di pihak pemerintah dan berseberangan dengan mujtahid yang lain.

Faktor lain yang menyebabkan pembelahan ‘ulama ke dalam faksi pro dan anti konstitusionalisme adalah hubungan kekerabatan, khususnya pada fase-fase awal ketika terdapat ikatan kekeluargaan yang kuat di antara mereka mengambil peran aktif pada 1905-6. Faktor usia juga berpengaruh. Anak-anak mujtahid pada khususnya melihat gerakan tersebut sebagai kesempatan untuk mendapatkan status. Persaingan yang terjadi terutama antara Faz}lulla>h Nu>ri> dan Bihbaha>ni>, dianggap sebagai sebuah faktor, karena kedua mujtahid tersebut terikat kepada kelompok masyarakat yang berbeda, dan memiliki pandangan ideologis yang berbeda.[61]

Perbedaan respons terhadap konstitusionalisme juga disebabkan oleh perbedaan posisi finansial dan hubungan mereka dengan kelompok lain dalam masyarakat. Bihbaha>ni> dan Tabatabai punya pengkikut yang berbeda dari Faz}lulla>h Nu>ri>. Tekanan yang diberikan oleh pengikutnya membuat Bihbaha>ni> mempelajari hal-hal yang tidak menjadi minatnya sebagai ahli hukum Shari>‘ah. Kepeduliannya ialah memperoleh kembali kekuasaan dan pengaruhnya. Relasi sosial-ekonomi ‘ulama dengan kaum pedagang, dan isu-isu di sekitar perpajakan, dan gaji atau pendapatan lainnya ikut menentukan sikap/respon ‘ulama terhadap konstitusionalisme.

Selain itu, pandangan ideologis juga menjadi faktor yang membelah respon ‘ulama terhadap konstitusionalisme. Hal ini juga berkaitan dengan peran dan relasi dengan Sha>h. ‘Ulama anti-konstitusionalisme menganggap bahwa selama Imam ghaib sistem absolutis akan dengan baik mengabdi kepada kepentingan Islam, selama Sha>h menghormati shari‘at agama. Dalam sistem absolutis, Sha>h tergantung pada

[60] Ibid., 133.
[61] Martin, *Islam and Modernism*, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengabdian kepada Islam untuk menjustifikasi kekuasaannya. ‘Ulama konstitusionalis, setidak-tidaknya yang dipimpin oleh T{abat{aba>’i>, percaya bahwa Islam Shi>‘ah akan menjadi lebih kuat dengan pembentukan lembaga (majlis) yang dipilih, yang akan menyegarkan Iran sebagai kampung halamannya.

V. KESIMPULAN

Pertama, terjadinya revolusi konstitusional dilatar belakangi oleh keadaan sosial, politik dan agama di Persia (Iran) yang mengalami kemerosotan. Berbagai kebijakan politik yang dilakukan oleh penguasa dinasti Qajar tidak mampu melepaskan Persia dari ketergantungan ekonomi dan politik kepada kekuatan-kekuatan asing, seperti Rusia dan Inggris. Situasi ini mengakibatkan terjadinya sikap-sikap politik yang beragam di kalangan ‘ulama dan kalangan intelektual sekular. Kecenderungan absolutis dan despotik yang ditunjukkan oleh penguasa Qajar (Sha>h) sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20 mendorong munculnya tuntutan kepada pembaruan politik, dengan membatasi otoritas penguasa (Sha>h) melalui pembentukan majlis dan penyusunan sebuah konstitusi tertulis.

Kedua, dinamika yang terjadi selama perdebatan konstitusional, baik di dalam maupun di luar majlis, menunjukkan bahwa Revolusi Konstitusional di Persia tidak dapat dipisahkan dari isu-isu yang kompleks, mulai politik, ekonomi sampai agama. Revolusi konstitusional dapat dikatakan sebagai manifestasi politik dari kekecewaan kaum ‘ulama Shi‘ah yang berpengaruh, intelektual sekular, para pedagang dan kelompok-kelompok sosial yang lain terhadap rejim dan tatanan yang ada. Tujuan gerakan konstitusional adalah untuk menghilangkan dominasi asing, menyelematkan negara dari kehancuran, mengakhiri ketiadaan hukum, dan membatasi kekuasaan sewenang-wenang raja, dengan menyusun konstitusi tertulis dan membentuk Majlis.

Ketiga, dalam menyikapi konstitsionalisme dan revolusi konstitusional tersebut ‘ulama Shi‘ah Iran terpecah menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah ‘ulama yang mendukung revolusi konstitusional, dan kelompok kedua adalah ‘ulama yang menolak revolusi konstitusional. Dukungan ‘ulama terhadap revolusi konstitusional direpresentasikan oleh Bihbaha>ni> dan Tabataba’i yang didukung oleh tiga ‘ulama yang tinggal di Najaf yang mendukung konstitusionalisme: ‘Abd-Alla>h

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazandarani (w.1912), Akhund Muh}ammad Ka>z}im Khurasani (w.1911), dan Hajji Mirza Husain Khalili Tihrani (w.1908).

Sedangkan ‘ulama yang menentang teori dan praktik konstitusionalisme secara tajam adalah Faz}lulla>h Nu>ri>. Meskipun pada tahap awal terlibat dalam gerakan konstitusional, pada musim semi 1907 dia berbalik menentang konstitusionalisme. Dia menyatakan bahwa tujuan awal gerakan konstitusional, yakni pembentukan majlis yang hendak menerapkan hukum Shari>‘ah, telah disubversi dengan munculnya anggota sekte baru dan kaum sekularis dalam barisan konstitusionalis.

Perbedaan respon ‘ulama terhadap revolusi konstitusional dipengaruhi oleh dimensi-dimensi sosial ekonomi, politik dan argumen keagamaan. Perbedaan respon terhadap konstitusionalisme tidak semata-mata disebabkan oleh penafsiran terhadap doktrin agama atau shari>‘ah dan masalah legitimasi semata, melainkan juga faktor-faktor yang kompleks yang mencakup relasi ekonomi, sosial dan kekuasaan. Asal-usul sosial, relasi sosial ekonomi, hubungan kekerabatan dan intelektual, dan pengalaman relasi kekuasaan yang dimiliki oleh Bihbaha>ni> dan koleganya sebagai pendukung konstitusionalisme di satu pihak, dan Nu>ri> sebagai pendukung absolutisme di pihak lain, merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi bentuk-bentuk respon yang berbeda dari kalangan ‘ulama terhadap konstitusionalisme

BIBLIOGRAFI

Abrahamian, Ervand. “The Causes of the Constitutional Revolution in Iran.” *International Journal of Middle East Studies*, vol.10, no. 3 (Aug., 1979): 381-414.

Afary, Janet. *The Iranian Constitutional Revolution 1906-1911: Grassroots Democracy, Social Democracy, and the Origins of Feminism.* New York: Columbia University Press, 1996.

Algar, Hamid. “Religious Forces in Eighteenth- and Nineteenth-Century Iran,” *The Cambridge History of Iran 7: From Nadir Sha>h to the Islamic Republic* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Algar, Hamid. “Religious Forces in Twentieth-Century Iran,” *The Cambridge History of Iran 7.* Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Algar, Hamid. “The Oppositional Role of the Ulama in Twentieth-Century Iran,” in Nikki R. Keddie (ed.), *Scholars, Saints, and Sufis: Muslim Religious Institution in the Middle East Since 1500.* Berkeley: University of California Press, 1972.

Algar, Hamid. *Religion and State in Iran 1785-1906: The Role of the Ulama in the Qajar Period.* Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amanat, Abbas. *Resurrection and Renewal: The Making of the babi Movement in Iran 1844-1850.* Ithaca: Cornell University Press, 1989.

Arjomand, Said Amir (ed.). *Authority and Political Culture in Shi'ism*. Albany, New York: SUNY Press, 1988.

Arjomand, Said Amir. *The Shadow of God and the Hidden Imam*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1984.

Arjomand,Said Amir. "Religion and Constitutionalism in Western History and in Modern Iran and Pakistan," dalam *The Political Dimensions of Religion*, ed. Said Amir Arjomand. Albany, New York: SUNY Press, 1993.

Bayat, Mangol. *Iran's First Revolution: Shi'ism and the Constitutional Revolution*. New York: Oxford University Press, 1991.

Bayat, Mangol. *Mysticism and Dissent: Socioreligious Thought in Qajar Iran*. Syaracuse: Syracuse University Press, 1982.

Encyclopaedia Iranica; at http://www.iranicaonline.org/articles/constitutional-evolution-i (intellectual background); ii (the events); iii (the constitution).

Fuad, Ahmad Nur. *Islam Milenaris: Asal-Usul, Doktrin dan Pemberontakan Gerakan Babisme 1844-1853*. Surabaya: LPAM, 2002.

Gheissari, Ali. *Iranian Intellectual in the 20th Century*. Austin: University of Texas Press, 1998.

Hambly, Gavin R. G. "Aga Muh}ammad Kha>n and the Establishment of the Qajar Dynasty," *The Cambridge History of Iran 7*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, 104-143.

Joseph, Jonathan. *Social Theory: Conflict, Cohesion and Consent.* Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003.

Keddie, Nikki R. *Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran.* With A Section By Yann Richard. New Haven: Yale University Press, 1981.

Lahidji, Abdol Karim. "Constitusionalism and Clerical Authority," dalam Said Amir Arjomand (ed.), *Authority and Political Culture in Shi'ism.* Albany: State University of New York Press, 1988, 133-158.

Martin, Vanessa. *Islam and Modernism: The Iranian Revolution of 1906.* Syracuse: Syracuse University Press, 1989.

Milani, Mohsen M. *The Making of Iran's Islamic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic.* Boulder, San Fransisco and Oxford: Westview Press, 1994.

Momen, Moojan. *An Introduction to Shi'i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi'ism*. New Haven and London: Yale University Press, 1985.

Royce, William R. "Mir Ma'sum 'Ali Sha>h and the Ni'mat Alla>hi Revival 1776-7 to 1796-7: A Study of Sufism and its Opponents in Late Eighteenth Century Iran," (Ph.D. Dissertation, Princeton University, 1979).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id